

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Agensi

Konsep agency theory menurut Anthony dalam Praditia (2010) yaitu hubungan antara prinsipal dan agen. Prinsipal memperkerjakan agen untuk melakukan tugas untuk kepentingan prinsipal, termasuk pendelegasian otorisasi pengembalian keputusan dari prinsipal kepada agen. Pada perusahaan yang modalnya terdiri atas saham, pemegang saham bertindak sebagai prinsipal, dan CEO (Chief Executive Officer) sebagai agen mereka.

Teori keagenan dapat menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan akan berperilaku, karena pada dasarnya antara agent dan principal memiliki kepentingan yang berbeda yang menyebabkan terjadinya konflik keagenan (agent conflict). Pada dasarnya konflik keagenan terjadi karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan.

Adanya konflik kepentingan antara investor dan manajer menyebabkan munculnya agency cost yaitu biaya monitoring (monitoring cost) yang dikeluarkan oleh principal seperti auditing, penganggaran, sistem pengendalian dan kompensasi biaya perikatan (bonding expenditure) yang dikeluarkan oleh agent dan kerugian residual berkaitan dengan divergensi kepentingan antara principal dan agent. Menurut Jensen dan Meckling dalam Siti dan Purwaningtias (2011), adanya masalah keagenan memunculkan biaya agensi yang terdiri dari:

1. *The monitoring expenditure by the principle (monitoring cost)*, yaitu biaya pengawasan yangb dikeluarkan oleh principal untuk mengawasi perilaku dari agent dalam mengelola perusahaan.
2. *The bounding expenditure by the agent (bounding cost)*, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh agent untuk menjamin bahwa agent tidak bertindak yang merugikan principal

3. *The residual Loss*, yaitu penurunan tingkat utilitas principal maupun agent karena adanya hubungan agensi.

2.2 Nilai Perusahaan

2.2.1 Pengertian Nilai Perusahaan

Sukirni (2012) menjelaskan bahwa nilai perusahaan sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan setelah melalui suatu proses kegiatan selama beberapa tahun, yaitu sejak perusahaan tersebut didirikan sampai dengan saat ini. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan, nilai perusahaan yang tinggi akan membuat pelaku pasar percaya pada kinerja perusahaan dan kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan sehingga akan menyebabkan perusahaan memiliki prospek yang bagus untuk kedepannya sehingga akan meningkatkan kemakmuran para pemegang saham. Meningkatkan nilai perusahaan merupakan sebuah pencapaian hasil kinerja perusahaan yang sesuai dengan keinginan para pemiliknya karena dengan meningkatnya nilai perusahaan maka kesejahteraan para pemilik juga akan meningkat sehingga memaksimalkan nilai perusahaan sangat penting bagi suatu perusahaan.

Nilai perusahaan yang tinggi akan diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham. Suyanti et al (2010) menyebutkan bahwa jika kemakmuran pemegang saham terjamin maka sudah pasti nilai perusahaan meningkat, dan kemakmuran pemegang saham ini akan dapat meningkat apabila harga saham yang dimilikinya juga meningkat. Dengan kata lain, bagi perusahaan yang menerbitkan saham dipasar modal, harga saham yang ditransaksikan di pasar modal merupakan indikator nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi akan membuat pasar percaya tidak hanya pada kinerja perusahaan saat ini, namun juga pada prospek perusahaan dimasa yang akan datang.

2.2.2 Pengukuran Nilai Perusahaan

Menurut Brigham *et al.*, (2001:101) dalam Moniaga (2013) terdapat beberapa pendekatan analisis rasio dalam penilaian *market value*, terdiri dari pendekatan *price earning ratio* (PER), *price book value ratio* (PBVR), *market book ratio* (MBR), *deviden yield ratio* (DYR), dan *deviden payout ratio* (DPR). Dalam penelitian ini nilai perusahaan diukur dengan PBV. *Price Book Value* digunakan sebagai proksi karena keberadaan PBV sangat penting bagi investor untuk menentukan strategi investasi di pasar modal. PBV dapat menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan menciptakan nilai relatif terhadap jumlah modal yang diinvestasikan. PBV merupakan rasio antara harga saham terhadap nilai bukunya. Semakin tinggi PBV, semakin tinggi tingkat kepercayaan pasar terhadap prospek perusahaan, maka akan menjadi daya tarik bagi investor untuk membelinya, sehingga permintaan saham tersebut akan naik dan meningkatkan harga saham.

Semakin tinggi harga saham, semakin berhasil perusahaan menciptakan nilai bagi pemegang saham. Ada beberapa keunggulan PBV yaitu nilai buku merupakan ukuran yang stabil dan sederhana yang dapat dibandingkan dengan harga pasar. Keunggulan kedua adalah PBV dapat dibandingkan antar perusahaan sejenis untuk menunjukkan tanda mahal atau murahnya suatu saham perusahaan.

2.2.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi Nilai Perusahaan

1. Pengaruhnya keputusan investasi

Jika investasi perusahaan bagus maka akan berpengaruh pada Kinerja Perusahaan, dan hal ini pun akan direspon positif oleh investor dengan membeli saham perusahaan tersebut sehingga harga saham akan naik.

2. Keputusan Pendanaan

Perusahaan yang porsi utangnya tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut mampu untuk membayar kewajiban-kewajiban di masa yang akan datang sehingga akan mengurangi ketidakpastian investor terhadap

kemampuan perusahaan dalam memberikan pengembalian atas modal yang telah disetorkan investor.

3. Kebijakan Dividen

Signaling theory menekankan bahwa pembayaran deviden merupakan sinyal bagi para investor bahwa perusahaan memiliki kesempatan untuk tumbuh di masa yang akan datang, sehingga pembayaran deviden akan meningkatkan apresiasi pasar terhadap saham perusahaan yang membagikan deviden tersebut, dengan demikian pembayaran deviden berimplikasi positif terhadap nilai perusahaan.

4. Ukuran Perusahaan

Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar keyakinan investor akan kemampuan perusahaan dalam memberikan tingkat pengembalian investasi

5. Profitabilitas

Profitabilitas yang tinggi mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang tinggi bagi para pemegang saham. Dengan rasio profitabilitas yang tinggi akan menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan.

2.3 Earnings Management

2.3.1 Pengertian *Earnings Management*

Menurut Islahuzzaman (2012:257) mendefinisikan Manajemen Laba adalah sebagai berikut :

“Manajemen Laba adalah proses penyusunan laporan keuangan bagi pihak eksternal sehingga dapat meratakan, menaikkan dan menurunkan laporan laba, dimana manajemen dapat menggunakan kelonggaran penggunaan metode akuntansi.”

Menurut Kieso (2011: 145) mendefinisikan manajemen laba sebagai berikut:

“Earning management is often defined as the planned timing of revenues, expenses, gains, and losses to smooth out bumps in earnings”.

Menurut Sri Sulistyanto (2008:6) Mendefinisikan Manajemen Laba Sebagai berikut:

“Manajemen laba adalah upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui *stakeholder* yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan”.

Isu-isu dalam manajemen laba menurut Belkaoui (2007: 206-210), antara lain sebagai berikut:

1. Manajemen laba yang bertujuan untuk memenuhi harapan dari analisis keuangan atau manajemen (yang diwakili oleh peramalan laba dari publik).
2. Manajemen laba bertujuan untuk mempengaruhi kinerja harga jangka pendek dengan berbagai cara.
3. Manajemen laba berakhir dan dapat bertahan karena informasi yang asimetris suatu kondisi yang disebabkan oleh informasi yang diketahui manajemen namun tidak ingin untuk mereka ungkapkan.
4. Manajemen laba terjadi dalam konteks suatu kumpulan pelaporan yang fleksibel dan seperangkat kontrak tertentu yang menentukan pembagian aturan diantara pemegang kepentingan.
5. Strategi perusahaan bagi manajemen laba mengikuti satu atau lebih dari tiga pendekatan (memilih dari pilihan-pilihan yang ada dalam GAAP/ *Generally Accepted Accounting Principle*, bergantung pada perkiraan subjektif dan pilihan aplikasi yang ada dalam opsi. Dan menggunakan akuisisi serta disposisi aktiva dan waktu untuk melaporkannya).
6. Manajemen laba merupakan suatu hasil usaha untuk melewati ambang batas.

7. Manajemen laba dapat berasal dari pemenuhan perjanjian dari kontrak kompensasi implisit.
8. Manajemen laba tumbuh dari ancaman dua bentuk aturan yakni aturan industri spesifik dan aturan *antitrust*.
9. Laba negatif secara tiba-tiba umumnya lebih merugikan daripada revisi ramalan negatif.

Menurut Watts dan Zimmerman dalam Sulistyanto (2008: 44-46) ada beberapa faktor yang mendorong manajer melakukan praktik manajemen laba, yaitu:

1. Perencanaan Bonus

Manajer yang memiliki informasi atas laba bersih perusahaan akan bertindak secara oportunistik untuk melakukan *earnings management* dengan memaksimalkan laba saat ini.

2. Motif Politik

Earnings management digunakan untuk mengurangi laba yang dilaporkan pada perusahaan publik. Perusahaan cenderung mengurangi laba yang dilaporkan karena adanya tekanan publik yang mengakibatkan pemerintah menetapkan peraturan yang lebih ketat.

3. Motif Pajak

Motivasi penghematan pajak menjadi motivasi *earnings management* yang paling nyata. Berbagai metode akuntansi digunakan dengan tujuan penghematan pajak pendapatan.

4. Pergantian CEO

CEO yang mendekati masa pensiun akan cenderung menaikkan pendapatan untuk meningkatkan bonus mereka dan jika kinerja perusahaan buruk akan memaksimalkan pendapatan agar tidak diberhentikan.

5. IPO (*Initial Public Offering*)

Informasi mengenai laba menjadi sinyal atas nilai perusahaan pada perusahaan yang akan melakukan IPO. Hal ini berakibat bahwa manajer perusahaan yang

akan *go public* melakukan *earnings management* menaikkan harga saham perusahaan.

6. Pentingnya Memberi Informasi Kepada Investor Informasi mengenai kinerja perusahaan harus disampaikan kepada investor sehingga pelaporan laba perlu disajikan agar investor tetap menilai bahwa perusahaan tersebut dalam kinerja yang baik.

Secara umum, terdapat lima teknik manajemen laba menurut Wolk, Dodd, dan Tearney dalam Sulistiawan (2011:43-51), yaitu:

1. Mengubah Metode Akuntansi

Metode akuntansi merupakan pilihan-pilihan yang disediakan oleh standar akuntansi dalam menilai aset perusahaan. Pemilihan atas metode akuntansi tertentu akan memberikan *outcome* yang berbeda, baik bagi manajemen, pemilik, maupun pemerintah yang berdampak menimbulkan konflik kepentingan di antara ketiganya. Namun, pemilihan metode akuntansi tertentu yang dilakukan oleh manajer atau pengelola perusahaan merupakan salah satu bentuk maksimalisasi nilai perusahaan menurut perspektifnya masing-masing, sejalan pemilihan tersebut sejalan dengan rambu-rambu yang sudah diatur.

2. Membuat Estimasi Akuntansi

Teknik ini dilakukan dengan tujuan memengaruhi laba akuntansi melalui kebijakan dalam membuat estimasi akuntansi. Cara untuk mendapatkan tambahan atau pengurangan laba adalah mengubah estimasi akuntansi. Perubahan estimasi akuntansi ini disesuaikan dengan kebutuhan penyajian laporan keuangan. Jika mengharapkan kenaikan laba, perusahaan dapat mengubah estimasi aset tetap atau aset tidak berwujudnya menjadi lebih panjang. Hasilnya, laba menjadi lebih tinggi karena biaya penyusutan menurun.

3. Mengubah Periode Pengakuan Pendapatan dan Biaya

Teknik ini dilakukan untuk mempercepat atau menunda pengakuan pendapatan dan biaya dengan cara menggeser biaya dan pendapatan ke periode berikutnya

agar memperoleh laba maksimum. Teknik ini biasanya dilakukan pada perusahaan yang melakukan IPO. Manajer akan mempercepat pengakuan pendapatan periode mendatang dengan melaporkannya ke periode tahun berjalan agar kinerja perusahaan pada tahun berjalan menjelang IPO terlihat baik, atau menunjukkan laba maksimal.

4. Mereklasifikasi Akun

Teknik ini dilakukan dengan memindahkan posisi akun dari satu tempat ke tempat lainnya. Jadi, sebenarnya laporan keuangan yang disajikan sudah sama, tetapi karena kelihaiannya penyajinya, laporan keuangan ini bisa memberikan dampak interpretasi yang berbeda bagi penggunanya. Implikasi dari teknik ini berdampak pada terjadinya kesalahan interpretasi laporan keuangan oleh pengguna, terutama yang tidak memiliki pengetahuan akuntansi. Meskipun laba rugi memberikan informasi lengkap, sampai saat ini banyak pengguna laporan keuangan cenderung hanya membaca bagian laba bersihnya.

5. Mereklasifikasi AkruaI Diskresioner dan AkruaI Nondiskresioner

AkruaI diskresioner adalah akruaI yang dapat berubah sesuai dengan kebijakan manajemen, seperti pertimbangan tentang umur ekonomis aset tetap atau pertimbangan pemilihan metode depresiasi. AkruaI nondiskresioner adalah akruaI yang dapat berubah bukan karena kebijakan atau pertimbangan pihak manajemen, seperti perubahan piutang yang besar karena adanya tambahan penjualan yang signifikan.

Pada umumnya pendeteksian manajemen laba dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan *accruals*. Pendekatan ini akan menggunakan pengukuran berbasis akruaI (*accrual based measures*) dalam mendeteksi ada tidaknya manipulasi. Menurut Sri Sulistyanto, 2008:211 yaitu:

1. Model berbasis *Aggregate Accrual*

Model berbasis *Aggregate Accrual* yaitu Model yang digunakan untuk mendeteksi aktivitas rekayasa ini dengan menggunakan *discretionary accrual* Sebagai proksi manajemen laba.

2. Model Berbasis *Spesific Accruals*

Model Berbasis *Spesific Accruals* yaitu pendekatan yang menghitung akrual sebagai proksi manajemen laba dengan menggunakan item atau komponen laporan keuangan tertentu dari industri tertentu, misalnya piutang tak tertagih dari sektor industri tertentu atau cadangan kerugian piutang dari industri asuransi.

3. Model Berbasis *Distribution Of Earning After Management*

Pendekatan ini dikembangkan dengan melakukan pengujian secara statistik terhadap komponen-komponen laba untuk mendeteksi faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan laba.

Menurut Sri Sulistyanto (2008:165) manajemen laba dapat diukur dengan *discretionary accrual*. Dalam penelitian ini *discretionary accrual* digunakan sebagai proksi karena merupakan komponen yang dapat dimanipulasi oleh manajer seperti penjualan kredit.

1. Nilai total akrual diperoleh dari selisih antara Laba Bersih dan Arus kas dari operasi. Laba bersih diperoleh dari laporan laba rugi dan arus kas dari operasi diperoleh dari laporan arus kas.

2. Menentukan Nilai Δ Sales dan Δ REC.

$$\Delta\text{Sales} = \text{Penjualan Tahun } t - \text{Penjualan } t-1$$

$$\Delta\text{REC} = \text{Piutang } t - \text{Piutang } t-1$$

Δ Sales diperoleh dari selisih penjualan tahun tes dengan penjualan tahun sebelumnya. Sedangkan Δ REC diperoleh dari selisih piutang tahun tes dengan piutang tahun sebelumnya. Nilai penjualan diperoleh dari laporan laba rugi dan piutang diperoleh dari laporan posisi keuangan.

3. Menentukan Parameter β_1 β_2 β_3 .

β_1 β_2 β_3 yang dihitung dengan persamaan regresi linear berganda yang berbasis *Ordinary least square* (OLS)

Untuk mendapatkan β_1 β_2 β_3 yang diperoleh dari hasil regresi TA/Ait-1 digunakan sebagai variabel Y, $1/Ait-1$ digunakan sebagai variabel X1, $\Delta Sales/Ait$ -digunakan sebagai variabel X2 dan $PPEit/ Ait-1$ digunakan sebagai variabel X3.

4. Setelah mendapatkan nilai β_1 β_2 β_3 , langkah selanjutnya adalah menghitung *Nondiscretionary accrual*.

2.4 Corporate Governanace

2.4.1 Pengertian Corporate Governance

Telah banyak ahli akuntan dan para pakar akuntansi yang mengungkap mengenai definisi Corporate Governance. Herawaty (2007), menyatakan bahwa pengertian *Corporate Governance* adalah *The Rule of Stakeholders, Directors, and other manager in Corporate decision makin*. Tentang *Good Corporate Governance* menurut *Cadbury Committee* dalam Forum Corporate Governance Indonesia (FCGI) adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. *Corporate Governance* pada hakikatnya merupakan konsep yang didasari pada teori keagenan, yang memberikan keyakinan pada investor bahwa *agent* akan bekerja untuk kepentingan mereka.

Solomon (dalam Yesika, 2013) menyatakan bahwa:

“.....*the system of check and balance, both internal and external to companies which ensures that companies discharge their accountability to all their*

stakeholders and act in a socially responsible way in all areas of their business activity”.

Lebih lanjut lagi Yesika (2013) menambahkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik menurut Menteri Keuangan adalah struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan pada organ perusahaan untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai perusahaan bagi seluruh stakeholder.

Sefiana (2008) mengatakan bahwa Corporate Governance pada hakikatnya merupakan suatu konsep yang bertujuan menjadikan perusahaan menjadi lebih baik dan sehat dengan ke empat prinsipnya, yaitu transparansi, akuntabilitas, keterbukaan, dan bertanggung jawab (*Fairness*). *Corporate governance*, konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan. *Corporate Governance* berkaitan dengan bagaimana para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri/menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana/kapital yang telah ditanamkan oleh investor, dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para manajer (Shleifer dan Vishny, 1997). Dengan kata lain, *corporate governance* diharapkan dapat berfungsi untuk menekan atau menurunkan biaya keagenan (*agency cost*). *Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan) sangat dipengaruhi sekali oleh struktur kepemilikan perusahaan. Struktur kepemilikan dapat dibagi menjadi dua yaitu tersebar (*Dispersed Ownership*) dan dikendalikan oleh segelintir orang (*Concentrated Ownership*). Prinsip pokok yang perlu diperhatikan dalam praktik *corporate governance* adalah transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan responsibilitas.

2.4.2 Prinsip *Corporate Governance*

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara tentang “Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*)” tahun 2011 menyebutkan bahwa GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme perusahaan berlandaskan peraturan perundangundangan dan etika berusaha. Pengelolaan pelaksanaan *Good Corporate Governance* memerlukan prinsip-prinsip untuk menjalankannya. Menurut Thomas (2006) prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* adalah:

1. *Transparency* (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
2. *Accountability* (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. *Responsibility* (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) didalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
4. *Independency* (kemandirian), yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

Prinsip GCG yang disampaikan oleh Thomas juga senada dengan yang tertera pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor : PER-01/MBU/2011 khususnya pasal 3 yang berbunyi bahwa prinsip GCG itu adalah:

1. Transparansi (*transparency*), keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.
2. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
4. Kemandirian (*independensi*), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Prinsip GCG seperti yang dikembangkan oleh *Organisation of Economic Cooperation Development* (OECD) dalam Danu (2012) meliputi:

1. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham perlakuan/persamaan terhadap seluruh pemegang saham
2. Persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham
3. Peranan stakeholder yang terkait dengan perusahaan
4. Keterbukaan dan transparansi
5. Akuntabilitas dewan komisaris

Penerapan prinsip GCG pada hakikatnya akan meningkatkan citra dan kinerja perusahaan serta meningkatkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tujuan :

1. Memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan penerapan prinsip - prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan.
2. Terlaksananya perusahaan secara profesional dan mandiri.
3. Terciptanya pengambilan keputusan oleh seluruh organ perusahaan yang didasarkan pada nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Terlaksananya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap *stakeholders*.
5. Meningkatkan iklim investasi nasional yang kondusif.

2.4.3 Manfaat Corporate Governance

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan dilaksanakan *Corporate Governance* sesuai dengan *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) disebutkan sebagai berikut (Danu, 2012):

1. Meningkatkan kinerja Perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholder*
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan *Corporate Value*.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan sekaligus akan meningkatkan *shareholders value* dan *dividen*.

Surya dan Yustiavandana (dalam Laila, 2011), menyebutkan bahwa manfaat dan tujuan penerapan *Good Corporate Governance* adalah:

1. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing.

2. Mendapatkan biaya modal (*cost of capital*) yang lebih murah.
3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan.
4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan.
5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.

2.4.4 Mekanisme *Corporate Governance*

Menurut Nina (2013) mekanisme *Corporate Governance* dapat diklasifikasikan menjadi 2 kelompok yaitu mekanisme internal dan eksternal. Mekanisme internal adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti rapat umum pemegang saham (RUPS), komposisi dewan direksi, komposisi dewan komisaris, dan pertemuan dengan *board of director*. Mekanisme eksternal adalah cara untuk mempengaruhi perusahaan selain menggunakan mekanisme internal, seperti pengendalian oleh perusahaan dan pengendalian pasar. Sementara itu Damiri (2005), menyebutkan bahwa mekanisme *Good Corporate Governance* adalah suatu pola hubungan, sistem dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan, Direksi, Dewan Komisaris, RUPS, guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya berlandaskan peraturan dan perundangundangan serta norma yang berlaku. Diyanti (2010) menyatakan bahwa mekanisme *Good Corporate Governance* adalah seperangkat kesepakatan atau aturan institusi yang secara efektif mengatur pengambilan keputusan. Di sisi lainnya Purwaningtyas (2011) menyatakan bahwa mekanisme *Corporate Governance* mengacu pada sekumpulan mekanisme yang mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh manager ketika terjadi pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian. Selanjutnya, Purwaningtyas (2011) menyatakan bahwa mekanisme *Good Corporate Governance* akan dikaitkan dengan variabel kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen, dewan komisaris independen, komite audit dan ukuran dewan direksi. Mekanisme *Corporate Governance* yang baik akan memberikan

perlindungan kepada para pemegang saham dan kreditur untuk memperoleh kembali atas investasi dengan wajar, tepat dan seefisien mungkin serta memastikan bahwa manajemen bertindak sebaik mungkin untuk kepentingan perusahaan.

2.4.5 Pengukuran Corporate Governance

Implementasi pengukuran corporate governance dalam penelitian ini akan diukur dari 5 aspek yaitu: kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, kualitas audit dan , yang secara lengkap akan dijelaskan pada uraian berikut ini:

1. Kepemilikan Institusional

Penelitian yang dilakukan Shleifer dan Vishney (dalam Ayu, 2011) menyebutkan bahwa pemilik institusional memainkan peranan penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer. Mereka berpendapat bahwa seharusnya pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer untuk berfokus pada ekonomi, dan menghindari peluang untuk berperilaku mementingkan diri sendiri. Pemilik institusional memiliki kemampuan untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Khurana dan Moser (2009) juga menyebutkan bahwa besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional akan mempengaruhi kebijakan dalam pengambilan keputusan. Darmawati (2006) dalam jurnalnya juga mengatakan bahwa ada dua dampak utama dari besarnya saham yang dimiliki oleh pihak tertentu. Pertama dengan meningkatnya hak aliran kas dari pemegang saham terbesar maka akan menimbulkan dampak positif. Dengan memiliki peneringkatan *corporate governance* yang baik , maka pasar akan mengapresiasi, sehingga nilai perusahaan akan meningkat dan selanjutnya akan berdampak positif pada nilai saham yang mereka miliki. Pemegang saham akan memiliki insentif dalam meningkatkan kualitas *corporate governance* perusahaan yang bersangkutan. Pandangan kedua merupakan kebalikan dari pandangan pertama, jadi semakin terkonsentrasinya kepemilikan perusahaan, maka pemegang saham

mayoritas akan semakin menguasai perusahaan dan semakin dapat mempengaruhi pengambilan keputusan

2. Kepemilikan manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan kondisi di mana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan (Tarigan, Josua dan Yulius Yogi Christiawan, 2007: 2). kepemilikan manajerial sebagai tingkat kepemilikan saham pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan, misalnya direktur, manajemen, dan komisaris. Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial merupakan kondisi di mana manajer perusahaan merangkap jabatan sebagai manajemen perusahaan sekaligus pemegang saham yang turut aktif dalam pengambilan keputusan. Manajer dalam menjalankan operasi perusahaan seringkali bertindak bukan untuk memaksimalkan kemakmuran pemegang saham, melainkan justru tergoda untuk meningkatkan kesejahteraannya sendiri. Kondisi tersebut akan mengakibatkan munculnya perbedaan kepentingan antara pemegang saham dengan manajerial. Konflik yang disebabkan oleh pemisahan antara kepemilikan dan fungsi pengelolaan dalam teori keuangan disebut konflik keagenan atau *agency conflict* menurut (Luciana Spica Almilia dan Meliza Silvy dan Meliza, 2006 : 2).

Situasi tersebut di atas tentunya akan berbeda jika kondisi manajer juga sekaligus sebagai pemegang saham. Secara teoritis ketika kepemilikan manajerial rendah maka insentif terhadap kemungkinan terjadinya perilaku oportunistik manajer akan meningkat. Adanya kepemilikan manajerial dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham luar dengan manajemen (Jensen dan Meckling, 1976: 339). Selaras dengan Tarigan, Josua dan Yulius Yogi Christiawan (2007: 2) yang menyatakan bahwa dalam perusahaan dengan kepemilikan manajerial, manajer yang sekaligus pemegang saham tentunya akan menyelaraskan kepentingannya sebagai manajer dengan kepentingannya sebagai pemegang saham. Dengan demikian, manajer akan bertindak secara hati-hati

dalam mengambil keputusan karena mereka akan turut menanggung hasil keputusan yang diambil. Pada kepemilikan yang menyebar, masalah keagenan terjadi antara pihak manajemen dengan pemegang saham. Hal ini menyebabkan pemegang saham memiliki kekuasaan dan menyerahkannya kepada manajer. Sebagai konsekuensinya, manajer menuntut kompensasi yang tinggi sehingga berdampak pada meningkatnya biaya keagenan. Pada kondisi ini, konflik keagenan diatasi dengan meningkatkan kepemilikan manajerial menurut (Luciana Spica Almiliadan Meliza Silvy dan Meliza, 2006: 2). Manajer mendapat kesempatan untuk terlibat pada kepemilikan saham dengan tujuan untuk menyetarakan dengan pemegang saham. Oleh karena pendanaan dengan sumber dana internal lebih efisien dibanding pembiayaan dengan sumber daya eksternal maka melalui kebijakan tersebut manajer diharapkan menghasilkan kinerja yang baik serta mengarahkan dividen pada tingkatan yang rendah. Penetapan dividen yang rendah akan membuat perusahaan memiliki laba ditahan yang tinggi sehingga memiliki sumber dana internal relatif tinggi (Chen dan Steiner melalui Kartika Nuringsih, 2005: 108).

3. Komisaris independen

Komisaris independen didefinisikan sebagai seseorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dalam pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dengan dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik. Menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI, jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari seluruh anggota komisaris. Di samping itu komisaris independen harus memahami undang-undang dan peraturan tentang pasar modal serta diusulkan oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam rapat umum pemegang saham (Pohan, 2008).

Menurut Kurniasih dan Siregar (dalam Ayu, 2011) ukuran dan komposisi dewan komisaris memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Ukuran komposisi dewan komisaris mempengaruhi efektifitas, dan aktivitas monitoring. Lain halnya dengan pendapat Yermarck (dalam Kurniasih dan Siregar, 2007) menemukan bahwa perusahaan yang memiliki jumlah anggota dewan sedikit mendapat penilaian dari pasar, di samping itu kinerja keuangan juga lebih baik pada beberapa perusahaan yang memiliki jumlah anggota dewan komisaris hanya sedikit. Penelitian yang menggunakan struktur dewan sebagai cermin mekanisme *corporate governance* yang dilakukan oleh Ayu (2011) menyatakan bahwa struktur dewan diproksikan dengan jumlah dewan komisaris dan presentase komisaris independen.

Hasil penelitian ditemukan bahwa jumlah dewan komisaris dan proporsi komisaris independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap surat utang. Proksi lain yang digunakan adalah persentase dewan komisaris independen. Komisaris independen bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait, sehingga keberadaan komite audit dan komisaris independen pada suatu perusahaan dapat meningkatkan integritas laporan keuangan (Mayangsari, 2003) Siallagan dan Machfoez (dalam Ayu, 2011) mengatakan bahwa selain konsentrasi kepemilikan, peranan dewan komisaris juga diharapkan dapat meningkatkan laba dengan membatasi tingkat manajemen laba melalui fungsi monitoring atas pelaporan keuangan. Fungsi monitoring yang dilakukan oleh dewan komisaris dipengaruhi oleh jumlah atau ukuran dewan komisaris. Dalam penelitiannya Siallagan dan Machfoez (2006) menggunakan proksi dewan komisaris untuk mengukur *corporate governance*.

4. Kualitas audit

Kurniasih dan Siregar dalam Ayu, 2011. Suartana (dalam Ayu, 2011) memaparkan hal-hal yang berhubungan dengan kualitas audit antara lain:

1. Lamanya auditor/umur audit. Semakin lama umur audit, maka semakin rendah kualitas auditnya.
2. Jumlah klien semakin banyak, maka semakin baik kualitas auditnya.
3. Kesehatan keuangan klien. Jika makin sehat keuangn klien, maka ada kecenderungan klien menekan auditor untuk mengikuti standar yang berlaku.
4. *Review* oleh pihak ketiga. Kualitas audit semakin tinggi apabila *direview* oleh pihak ketiga

5. Dewan Direksi

Board size atau ukuran dewan direksi adalah jumlah dewan direksi dalam perusahaan, semakin banyak dewan dalam perusahaan akan memberikan suatu bentuk pengawasan terhadap kinerja perusahaan yang semakin lebih baik, dengan kinerja perusahaan yang baik dan terkontrol, maka akan menghasilkan profabilitas yang baik dan nantinya akan dapat meningkatkan harga saham perusahaan dan nilai perusahaan pun juga akan ikut meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Isshaq, et al, hasil peneltiannya menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan positif antara board size dengan nilai perusahaan.

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2006:17) menjelaskan bahwa direksi merupakan organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolegal dalam mengelola perusahaan serta masing-masing anggota direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Ukuran dewan direksi dapat diukur dengan jumlah dewan direksi dalam perusahaan dimana semakin banyak dewan direksi dalam suatu perusahaan akan memberikan suatu bentuk pengawasan terhadap kinerja perusahaan yang semakin lebih baik.

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1.	Frysa Praditha Purwaningtyas (2010)	Analisis Pengaruh Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Mufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2007-2009)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen dan ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Akan tetapi, dewan komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan
2.	Okta Rezika Praditia (2010)	Analisis Pengaruh Mekanisme <i>Corporate Governance</i> Terhadap Manajemen Laba Dan Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Pada Tahun 2005-2008	Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme corporate governance yang diproksi dengan kepemilikan institusional, komisaris independen dan kualitas auditor tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan kualitas auditor tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sedangkan, komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan
3.	Wilsna Rupilu (2011)	Pengaruh Mekanisme <i>Corporate Governance</i> Terhadap Kualitas Laba Dan Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia	Dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kualitas laba. Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit berpengaruh positif terhadap kualitas laba. Dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap nilai

			<p>perusahaan. Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Komite audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan</p>
4.	<p>Paramita Anggia Puteri (2012)</p>	<p>Analisis Pengaruh <i>Investment Opportunity set (IOS)</i> Dan Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kualitas Laba dan Nilai perusahaan</p>	<p>Hasil penelitian menyatakan komisaris independen, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan sedangkan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.</p>
5.	<p>Ade Raya Herman syah (2013)</p>	<p>Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i>, pertumbuhan penjualan dan pertumbuhan total aset terhadap nilai perusahaan</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proposi dewan komisaris independen, komite audit, pertumbuhan penjualan, pertumbuhan total aset tidak berpengaruh secara parsial terhadap nilai perusahaan</p>
6.	<p>Jhoni Suhani (2013)</p>	<p>Analisis Pengaruh <i>Earnings Management</i>, Mekanisme <i>Corporate Governance</i> Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2011</p>	<p>Hasil penelitian memberikan bukti empiris bahwa earnings management, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun jumlah dewan komisaris kepemilikan manajerial kualitas auditor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun dapat disimpulkan bahwa secara simultan (bersama-sama) berdasarkan hasil uji F variabel independen yang terdiri dari earnings management, jumlah</p>

			dewan komisaris, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, klasifikasi akuntan publik dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan
7.	Ramadhan Sukma Perdana Raharja (2014)	Analisis Pengaruh Mekanisme <i>Corporate Governance</i> Terhadap Nilai Perusahaan	Kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Kepemilikan institusional dan komite audit berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Komite audit berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan

2.6 Kerangka Pemikiran

2.6.1 Variabel Independen X (Earnings Management)

Tujuan dari earnings management adalah meningkatkan kesejahteraan pihak tertentu walaupun dalam jangka panjang tidak terdapat perbedaan kumulatif perusahaan dengan laba yang dapat diidentifikasi sebagai keuntungan dan earnings management yang dilakukan manajemen perusahaan akan meningkatkan nilai perusahaan (PBV) lalu akan turun searah dengan peningkatan kepemilikan manajerial (Fischer dan Rosenweirg 1995 dalam Herawaty 2008).

2.6.2 Variabel Dependen Y (Nilai Perusahaan)

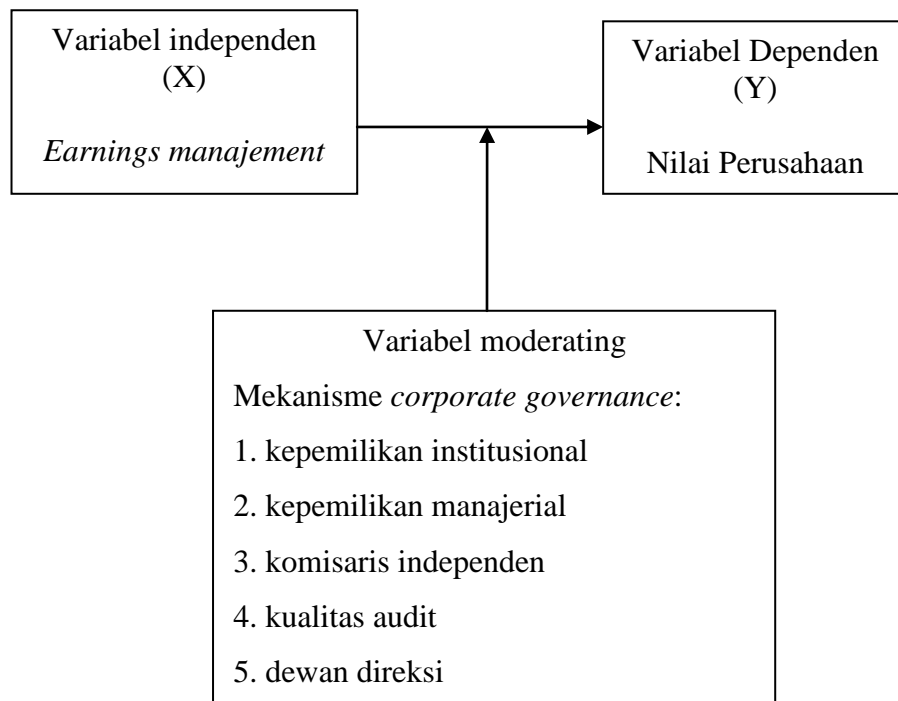
Menurut Fama (1978) dalam Untung Wahyudi (2008) nilai perusahaan akan tercermin dari harga sahamnya. Nilai perusahaan yang dibentuk melalui indikator nilai pasar saham sangat dipengaruhi oleh peluang-peluang investasi. Peluang investasi dapat memberikan sinyal positif tentang pertumbuhan perusahaan

dimasa yang akan datang,sehingga akan meningkatkan harga saham maka nilai perusahaan pun akan meningkat.

2.6.3 Variabel Moderating (*Corporate governance*)

Peran *Corporate governance* dipercaya dapat meningkatkan nilai perusahaan. Namun dengan alasan meningkatkan nilai perusahaan terkadang manajemen melakukan tindakan oportunitis dengan melakukan praktik manajemen laba. Oleh karena itu adanya praktek *Corporate governance* di perusahaan akan membatasi tindakan manajemen untuk melakukan praktik manajemen laba karena adanya mekanisme pengendalian dalam perusahaan tersebut (Rachmawati dan Triatmoko 2007:9)

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.7 Bangunan Hipotesis

2.7.1 *Earnings Management* terhadap Nilai perusahaan

Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibanding pemilik (pemegang saham) sehingga menimbulkan asimetri informasi. Manajer diwajibkan memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Sinyal yang diberikan merupakan cerminan nilai perusahaan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut penting bagi pengguna eksternal perusahaan karena kelompok itu berada dalam kondisi yang paling tidak tinggi tingkat kepastiannya (Ali, 2008).

Earnings Management dapat menimbulkan biaya-biaya keagenan (*agency cost*) yang dipicu dari adanya pemisahan peran atau perbedaan kepentingan antara pemegang saham (*principal*) dengan pengelola / manajemen perusahaan (*agent*). Manajemen selaku pengelola perusahaan memiliki informasi tentang perusahaan lebih banyak dan lebih dahulu daripada pemegang saham, sehingga terjadi asimetri informasi yang memungkinkan manajemen melakukan praktik akuntansi dengan orientasi pada laba untuk mencapai suatu kinerja tertentu. Konflik keagenan yang mengakibatkan adanya oportunistik manajemen yang akan mengakibatkan laba yang dilaporkan semua tidak benar, sehingga akan menyebabkan nilai perusahaan berkurang di masa yang akan datang.

Ha1 : *Earnings Management* berpengaruh terhadap nilai perusahaan

2.7.2 *Earnings Management* yang di moderasi oleh kepemilikan institusional

Investor institusional yang sering disebut sebagai investor yang canggih (*sophisticated*) sehingga seharusnya lebih dapat menggunakan informasi periode sekarang dalam memprediksi laba masa depan dibanding investor non institusional. Balsam dkk (2007) menemukan hubungan yang negatif antar *discretionary accrual* yang tidak diekspektasi dengan imbal hasil di sekitar tanggal pengumuman karena investor institusional mempunyai akses atas sumber informasi yang lebih tepat waktu dan relevan yang dapat mengetahui keberadaan

pengelolaan laba lebih cepat dan lebih mudah dibandingkan investor individual. Hasil penelitian Jiambavo dkk (1996) menemukan bahwa nilai *absolute discretioner* berhubungan negatif dengan kepemilikan institusional. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa ada efek *feedback* dari kepemilikan institusional yang dapat mengurangi pengelolaan laba yang dilakukan perusahaan.

Ha2 : *Earnings Management* berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan yang dimoderasi oleh kepemilikan institusional

2.7.3 *Earnings Management* yang di moderasi oleh kepemilikan manajerial

Jensen dan Meckling (1976) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berhasil menjadi mekanisme untuk mengurangi masalah keagenan dari manajer dengan menyelaraskan kepentingan-kepentingan manajer dengan pemegang saham. Penelitian mereka menemukan bahwa kepentingan manajer dengan pemegang saham eksternal dapat disatukan jika kepemilikan saham oleh manajer diperbesar sehingga manajer tidak akan memanipulasi laba untuk kepentingannya. Dalam kepemilikan saham yang rendah, maka insentif terhadap kemungkinan terjadinya perilaku oportunistik manajer akan meningkat (Shleifer dan Vishny,1986). Warfield et al (1995) dalam penelitiannya yang menguji kepemilikan manajerial dengan *discretionary accrual* dan kandungan informasi laba menemukan bukti bahwa kepemilikan manajerial berhubungan dengan negatif dengan *discretionary accrual*. Demikian halnya penelitian oleh Midiastuty dan Machfoedz (2006) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial merupakan salah satu mekanisme yang dapat membatasi perilaku oportunistik manajer dalam bentuk *earnings management*, walaupun Wedari (2007) menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial juga memiliki motif lain. Dalam penelitian ini mengacu pada teori yang ada menyatakan kepemilikan manajerial dapat berfungsi sebagai mekanisme *corporate governance* sehingga dapat mengurangi tindakan manajer dalam memanipulasi laba, hal ini berarti kepemilikan manajerial berhubungan negatif dengan *earnings management*.

Ha3 : *Earnings Management* berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan yang dimoderasi oleh kepemilikan manajerial

2.7.4 Earnings Management yang di moderasi oleh komisaris independen

Klein (2006) dalam penelitiannya membuktikan bahwa besarnya *discretionary accrual* lebih tinggi untuk perusahaan yang memiliki komite audit yang terdiri dari sedikit komisaris independen dibanding perusahaan yang mempunyai komite audit yang terdiri banyak komisaris independen. Hal ini mendukung penelitian Dechow dkk (1996) bahwa perusahaan memanipulasi laba lebih besar kemungkinannya apabila memiliki dewan komisaris yang didominasi oleh manajemen dan lebih besar kemungkinannya memiliki *Chief Executif Officer (CEO)* yang merangkap menjadi *chairman of board*. Hal ini berarti tindakan memanipulasi akan berkurang jika struktur dewan direksi berasal dari luar perusahaan. Jika fungsi independensi dewan direksi cenderung lemah, maka ada kecenderungan terjadinya *moral hazard* yang dilakukan oleh para direktur perusahaan untuk kepentingannya melalui pemilikan perkiraan-perkiraan akrual yang berdampak pada manajemen laba dan konsisten dengan Wedari (2007) yang menyimpulkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *discretionary accruals*.

Ha4 : Earnings Management berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan yang dimoderasi oleh komisaris independen

2.7.5 Earnings Management yang di moderasi oleh kualitas audit

Kualitas audit merupakan salah satu pertimbangan penting bagi investor untuk menilai kewajaran suatu laporan keuangan. Kualitas audit dipandang sebagai kemampuan untuk mempertinggi kualitas suatu laporan keuangan bagi perusahaan maka auditor yang berkualitas tinggi diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan investor. Akuntan publik sebagai auditor eksternal yang relatif lebih independen dibandingkan auditor internal sejauh ini diharapkan dapat meminimalkan praktik manipulasi laba dan meningkatkan kredibilitas informasi akuntansi dalam laporan keuangan. Meutia (2006) membuktikan tentang pengaruh independensi auditor terhadap manajemen laba untuk KAP Big5 Non Big5. Perusahaan yang diaudit oleh KAP Big5 memiliki *absolute discretionary accruals* yang lebih rendah, dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP Non

Big5. Hal ini menunjukkan bahwa KAP Big5 lebih berkualitas dalam mendeteksi berlakunya manajemen laba di dalam suatu perusahaan.

Ha5 : *Earnings Management* berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan yang dimoderasi oleh kualitas audit

2.7.6 *Earnings Management* yang di moderasi oleh dewan direksi

Board size atau ukuran dewan direksi adalah jumlah dewan direksi dalam perusahaan, semakin banyak dewan dalam perusahaan akan memberikan suatu bentuk pengawasan terhadap kinerja perusahaan yang semakin lebih baik, dengan kinerja perusahaan yang baik dan terkontrol, maka akan menghasilkan profitabilitas yang baik dan nantinya akan dapat meningkatkan harga saham perusahaan dan nilai perusahaan pun juga akan ikut meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suhani (2013), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan positif antara *board size* dengan nilai perusahaan.

Perusahaan yang menyelenggarakan mekanisme *corporate governance* diyakini akan membatasi pengelolaan laba yang oportunistik. Oleh sebab itu, semakin tinggi kualitas audit, semakin tinggi proporsi komisaris independen, kepemilikan manajerial, dewan direksi semakin kecil kemungkinan *earnings management* dilakukan, sehingga hubungan negatif antara *corporate governance* dan *earnings management* ini dapat memperlemah pengaruh antara *earnings management* dan nilai perusahaan.

Ha6 : *Earnings Management* berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan yang dimoderasi oleh dewan direksi